

Abstrak

Pengelolaan keuangan negara menjadi sangat penting sebagai alat untuk mengembangkan perekonomian negara dan mewujudkan cita-cita negara. Oleh karena itu, Pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini bendahara wajib membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas seluruh kas yang dikelolanya dan wajib menyampaikan LPJ tersebut kepada KPPN selaku Kuasa BUN paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penatausahaan LPJ Bendahara pengeluaran, dampak keterlambatan penyampaian LPJ bendahara pengeluaran, serta solusi yang dapat dilakukan jika terjadi kendala saat proses penatausahaan dan proses penyampaian LPJ oleh bendahara pengeluaran di lingkungan KPPN Surabaya II. Metode penelitian yang dilakukan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPN Surabaya II telah melaksanakan proses penatausahaan LPJ Bendahara Pengeluaran sesuai dengan aturan yang berlaku, serta selalu tepat waktu dalam proses penyampaian LPJ tersebut. Jika bendahara pengeluaran telat menyampaikan LPJ maka akan mendapat penundaan penerbitan SP2D atas SPM-UP/TUP/GUP maupun SPM-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran. Jika terjadi kendala, maka solusi yang dapat dilakukan yaitu satker selalu aktif berkoordinasi dengan KPPN atas kendala yang dialami serta aktif melaporkan pada aplikasi Hai DJPb untuk memperoleh solusi lebih lanjut atas permasalahan tersebut.

Kata Kunci: LPJ, Bendahara Pengeluaran, Kepatuhan

Abstract

Management of state finances is very important because it can be a tool to develop the economy and realize the goals of the country. Therefore, it must be accountable. In this case, the treasurer required to make accountability report (LPJ) of all the cash it manages. furthermore, the treasurer required to submit the LPJ to KPPN as the Proxy of BUN no later than the 10th of the following month. The purpose of writing this Final Paper is to determine the process of administering the LPJ, especially LPJ Treasurer of expenditures in the environment of KPPN Surabaya II as the research object in this final paper. besides, it aims to determine the impact if the treasurer expenditure late in the delivery of the LPJ and to find out the solutions if the expenditure treasurer in the KPPN Surabaya II environment have problems. The research method used are literature study and Field studies were conducted by interview and observation. The results showed that KPPN Surabaya II had performed the LPJ administration process for the Expenditure Treasurer suitable with applicable regulations, and always on time to submit LPJ. If the expenditure treasurer is late submitting LPJ, it will receive a delay in the issuance of SP2D on the SPM-UP/TUP/GUP and SPM-LS. If there are problems, the solution that can be done is the work of unit active to coordinate with KPPN and actively reports on the Hai DJPb application to get further solutions of the problems.

Keywords: Accountability Report (LPJ), expense treasurer, compliance